
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dalam Menuju Desa Mandiri Melalui Progam BUMDes Kabupaten Aceh Barat

Albilal Masria¹, Najamudin²

^{1,2}Universitas Teuku Umar

E-mail: albilalmas18@gmail.com

Article History:

Received: 10 Juni 2022

Revised: 15 Juni 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Keywords: BUMDes, Community and Gampong Empowerment, Independent Village

Abstract: *This study discusses the role of the Community and Gampong Empowerment Service in Towards an Independent Village through the BUMDes Program in West Aceh Regency. This research shows that in getting to an independent village the village must be able to utilize existing resources in the village, manage the arrangement and development of assets in the village appropriately, the village is able to be active in community institutions and in the community environment, the availability of funds or village budgets for managing various activities, both in terms of empowerment and empowerment of village development, and supporting facilities in the village to support the village economy. With this, it is hoped that the creation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) can become the foundation for villages in strengthening the village economy and prospering the village community in West Aceh, and also the village is able to manage the natural resources in the village. the obstacle towards independent villages in West Aceh is the weakness of the Quality of Human Resources (HR) in the village apparatus so that it becomes a very influential obstacle to village budget management which has an impact on preventing community poverty which has not been significant and has not been resolved.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas yang dimana memiliki banyak pulau dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Indonesia pula adalah negara pengguna teknologi terbesar dari negara-negara yang lainnya (Suharta & Firdausi, 2019). Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern yang dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat khususnya pada pelayanan publik terutama, menjadi tanggungjawab dari pemerintahan setempat untuk dapat memberikan sebuah pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dalam tanggung jawab ini aparatur pemerintahan dituntut untuk berperan aktif dalam pemerintahan agar dapat mengetahui apa yang

dibutuhkan dan kondisi masyarakat setempat (Permana & Masni, 2021). Desa merupakan atribut pemerintahan yang dimana berhadapan langsung dengan masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah sambung tangan pemerintah pusat, yang dimana kedudukan pemerintahan desa juga sangat penting, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sotya Partiwidiwijoyo, Wakhid Yuliyanto, & Ari Waluyo, 2020).

Setiap organisasi pemerintahan dituntut untuk dapat menjalankan pekerjaannya (Yudistira and Febsri 2019). Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Gampong juga berperan terhadap kemajuan desa sesuai dalam visi dan misi desa Aceh yaitu dengan membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi baik itu di tingkat nasional maupun regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum serta melindungi sentra-sentra produksi dan industry yang kreatif dalam hal membangun. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai penyelenggara wadah dari setiap gampong atau desa dalam menjalankan program dalam kemajuan desa. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk Seluruh desa di seluruh Indonesia yaitu menjadikan desa sebagai desa yang mandiri dengan pengelolaan sumber daya manusia dan alam agar tidak lagi berfokus pada bantuan negara yang secara tidak langsung melakukan desentralisasi pengelolaan pembangunan di desa baik secara Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya, dan juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi dan kapasitas aset desa baik secara fisik dan non fisik.

Pemerintahan Daerah Aceh Barat dalam meminimalisir desa yang miskin di Aceh Barat yaitu tertulis visi dan misi DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) yaitu: a. Mewujudkan penyelenggaraan Sumber Daya Alam Desa yang unggul. b. Melibatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat desa dalam pembangunan Ekonomi pedesaan c. Mengembangkan pemberdayaan dan kesejahteraan desa. Dalam visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat berfokus pada pemberdayaan desa yang mandiri agar desa di Kabupaten Aceh Barat mampu bersaing dalam memajukan dan memakmurkan daerah di Aceh. Pusat Badan Statistik (BPS) merilis penduduk miskin di Aceh naik menjadi 15,53 persen, tentu dengan kenaikan ini membuat Aceh menempati daerah termiskin di Sumatera dan masuk lima provinsi termiskin di Indonesia. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh Dadan Supriadi mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret-September 2021 secara persentase naik 0,20 poin menjadi 15,53 persen. Secara angka, penduduk miskin bertambah 16.020 orang, dalam hal ini Pemerintah Aceh Barat berbenah dalam meningkatkan kesejahteraan desa di Aceh Barat, desa atau gampong di Aceh Barat perlu disosialisasikan, dan arahan serta bimbingan pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk meningkatkan salah satu kualitas dari Sumber Daya Manusia untuk mengelola Sumber Daya Alam yang baik dan unggul. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat sendiri pada tahun 2019 pernah melakukan Uji Pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh Barat seperti : Menjahit, Tata boga, Posyantek dan lainnya untuk mulai berbenah dalam meningkatkan kualitas desa untuk menuju desa mandiri.

Mewujudkan dan menyelenggarakan desa yang mandiri untuk berfokus dalam pengelolaan BUMDes untuk dikelola secara mandiri oleh desa yang mana desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan desa dikarenakan penduduk desa cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas perekonomian dalam pengelolaan BUMDes untuk nasional. Selain itu pula posisi desa di nilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi

dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan kesejahteraan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan desa yang mandiri (Agunggunanto et al. 2016)

Hal tersebut juga didukung oleh (Hardijono dkk et al. 2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebagian atau keseluruhan anggarannya itu timbul dari kekayaan asli desa sendiri yang dibagi guna untuk mengelola desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa (Magister and Administrasi 2016). Penyaluran dana desa yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur desa tidaklah cukup untuk dapat mewujudkan desa mandiri. Oleh karena itu BUMDes merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh aparat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan dalam mensejahterakan hidup masyarakat (Zulfida and Samah 2021).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam mendorong, mendukung dan membina masyarakat baik itu dalam pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mendayagunakan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan sumber daya manusia di desa agar terciptanya desa yang mandiri. Maka dari itu walaupun desa sebagai ujung tombak dari kemajuan desanya sendiri akan tetapi peran dari instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang berfungsi sebagai pendukung pemerintahan desa sangat dibutuhkan dalam membina desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Simangunsong et al. 2019).

Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya seperti desa membutuhkan jalan yang bagus atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun yang nantinya bisa disediakan dan dikelola langsung oleh desa sendiri (Nugrahaningsih et al. 2018). Desa harus dapat menjadi salah satu kekuatan kunci ekonomi di Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya baik itu petani, pemuda-pemudi, masyarakat adat, anak-anak, perempuan, kelompok masyarakat asing dan kelompok penyandang cacat tanpa kecuali.

Banyak penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang desa mandiri tersebut penelitian yang dilakukan oleh (Irfan Nursetiawan et al. 2018) penelitian ini menunjukkan bahwa Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Martien Herna Susanti et al. 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan.

Melihat dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum dalam hal menjalankan tugasnya untuk menjadikan desa Aceh Barat menjadi desa yang mandiri. Menurut pandangan penulis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengalami sedikit peningkatan terkhususnya dalam hal memberdayakan masyarakat desa baik itu secara individu maupun kelompok yang bekerja di dinas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta yang terjadi di lapangan. penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat penelitian ini lebih ditekankan pada data yang diperoleh dari subyek penelitian. (Creswell 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami arti serta makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dengan hal ini penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivis. pendekatan post-positivis adalah metode yang menyimpang dari teori, kemudian peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data untuk mendukung/membantah teori tersebut, dan memperbaiki hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Creswell 2017).

Pada penelitian ini jumlah informan yang digunakan sebanyak 5 orang informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Mirsal, S.Sos.MSP. 2 orang Kepala Bidang Pembangunan Afifah, SKM.M.Kes. dan Kepala Bidang Pemerintahan Amiruddin, S.Ag. dan 1 orang Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Erlina dan 2 orang dari aparatur gampong. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan memperoleh hasil bahwasanya dalam menuju desa yang mandiri desa tersebut harus mampu melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada di didesa, menjalankan penataan serta pembangunan aset dalam desa dengan tepat guna, desa mampu aktif dalam kelembagaan masyarakat maupun dilingkungan masyarakat, tersedianya dana atau anggaran desa guna untuk mengelola berbagai kegiatan baik itu dalam hal pemberdayaan maupun pembangunan desa, dan terdapat kerja sama antar desa dengan pihak lainnya serta terdapat pendampingan dalam desa guna untuk menunjang perekonomian desa tersebut, informan juga mengatakan menuju desa yang mandiri sangat dibutuhkan pengawalan progam dana desa supaya pemerintahan desa bisa lebih akurat dan tepat sasaran dalam membangun dan menata desa. Tentu dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam mendukung dan memperbaiki perekonomian desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (11) ‘Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan seber-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan’ (Padli et al. 2021).

Dengan hal ini pemerintah berharap dengan terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi pondasi bagi desa dalam memperkuat perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Aceh Barat, dan juga desa mampu mengelola sumber daya alam yang ada didesa, memanfaatkan anggaran desa dengan baik dan mengelola aset desa yang tepat guna, agar terciptanya tujuan yang diinginkan. BUMDes sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan distribusi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sehingga kebutuhan desa dapat terpenuhi serta bisa dikelola langsung oleh desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong pada Tanggal 19 s.d 24 November 2021 melakukan suatu kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Melalui Pelatihan Skill Lanjutan

Kualitas Kerajinan Enceng Gondok di Gampong Gunong Pulo Kecamatan Arangon Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelatihan ini kepala Bidang Pembangunan mengatakan bahwa tujuan dalam dilakukannya pelatihan ini sebagai tugas atau peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk memberi pemahaman secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan SDA desa dan peningkatan Soft Skill dan Hard Skill kepada masyarakat di Gunong Pulo dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada di gampong tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan kerajinan yang dihasilkan di gampong tersebut supaya terjadinya peningkatan yang signifikan yang menunjang perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong juga melakukan berbagai pelatihan di tahun 2021 seperti, Pelatihan Peningkatan Pemerintah Gampong Terkait Kerja Sama Antar Gampong, Pelatihan Posyantek, Pelatihan Penguatan Desa dan Kecamatan (Kerja Sama Untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi), Fasilitas dan Pembinaan BUMDes. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan sebaik-baiknya Sumber Daya Alam yang ada di Desa, supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan akurat.

Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Dalam Menuju Desa Mandiri Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari informan bahwa yang menjadi hambatan dalam menuju desa mandiri di Aceh Barat ialah lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di perangkat desa sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa yang berdampak dalam pengentasan kemiskinan belum signifikan dan belum juga terselesaikan, pasalnya pengelolaan dan dana desa tersebut diwarnai dengan banyaknya penyimpangan akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) di perangkat desa. Informan juga mengatakan masih banyak Kepala Desa tidak mampu membaca anggaran yang ada atau kurangnya pemahaman dalam mendiagnosa anggaran desa tersebut. Sesuai dengan filosofinya, dengan adanya dana desa tersebut diharapkan dapat menjadi pengentasan masalah-masalah yang ada di desa baik itu dalam perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Namun, filosofi tersebut belum sepenuhnya terwujud dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di perangkat desa.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa adanya dukungan dari kualitas Sumber Daya Manusia akan menimbulkan ketimbangan dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, potensi SDA yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa, namun kembali lagi bagaimana desa tersebut mampu dalam mengelola dan memanfaatkan dalam proses pembangunannya, sesuai dengan dikatan Eddy Cahyono Sugiarto (Asdep Humas Kemensetneg) "Prioritas utama kita ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat". Dari kutipan tersebut jelas bahwasanya pemerintah telah menyadari apa yang menjadi pokok dari lambatnya kemajuan baik itu SDM dan Pembangunan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah dalam menuju desa yang mandiri desa tersebut harus mampu melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada di desa, menjalankan penataan serta pembangunan aset dalam desa dengan tepat guna, desa mampu aktif

dalam kelembagaan masyarakat maupun dilingkungan masyarakat, tersedianya dana atau anggaran desa guna untuk mengelola berbagai kegiatan baik itu dalam hal pemberdayaan maupun pembangunan desa, dan terdapat kerja sama antar desa dengan pihak lainnya serta terdapat pendampingan dalam desa guna untuk menunjang perekonomian desa tersebut. dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam mendukung dan memperbaiki perekonomian desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (11) “Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan seber-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan”. Hambatan dalam menuju desa mandiri di Aceh Barat ialah lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di perangkat desa sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa yang berdampak dalam pengentasan kemiskinan belum signifikan dan belum juga terselesaikan, pasalnya pengelolaan dan dana desa tersebut diwarnai dengan banyaknya penyimpangan akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) di perangkat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, and Edi Wibowo Kushartono Darwanto. 2016. “PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*.
- Creswell, John W. 2017. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Magister, Program, and Ilmu Administrasi. 2016. “Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).” *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 13(1):295–99.
- Nugrahaningsih, Putri, Falikhatun, and Jaka Winarda. 2018. “OPTIMALISASI DANA DESA DENGAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Des) MENUJU DESA MANDIRI.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 16(1). doi: 10.20961/jab.v16i1.190.
- Nursetiawan, Irfan. 2018. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4(2):72–81.
- Padli, Muhammad, Muhammad Ybnu Taufan, and Abdurahman Basalamah. 2021. “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mengawal Program Dana Desa Di Kabupaten Mamuju.” *JURNAL ILMU EKONOMI* 4(3).
- Simangunsong, H., Y. Perwira, and ... 2019. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Banjar Jaya: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa ...” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1):8–11.
- Susanti, Martien Herna. 2017. “Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.” *Integralistik* (1):29–39.
- Yudistira, Dori Sandra, and Susanti Febsri. 2019. “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN.” 2(3):1361–69.
- Zulfida, Ida, and Eri Samah. 2021. “MEMBANGUN DESA MANDIRI MELALUI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA.” *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* 1(1).



ULIL ALBAB : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

Surat Keterangan

Nomor : 219/ULIL ALBAB-UA.INSTT/VI/2022

Editor In Chief Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Albilal Masria¹, Najamudin²

Instansi : ^{1,2}Universitas Teuku Umar

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel yang berjudul "**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Dalam Menuju Desa Mandiri Melalui Program BUMDes Kabupaten Aceh Barat**" pada Jurnal ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin dan dapat kami **TERIMA** untuk diterbitkan pada Volume 1 No 7 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 14 Juni 2022

Hormat Kami,
Editor In Chief,



Ahmad Ulil Albab Al Umar